

DARI "KESEPIAN BERJEMAAH" KE "BONUS DEMOGRAFI"

BASIS

menembus fakta

FREDERICK RAY POPO

**Berharap
Bersama Kant**

JENNIE XUE

**AI dan Utopia
Kemanusiaan**

KLAUS HEINRICH RADITIO

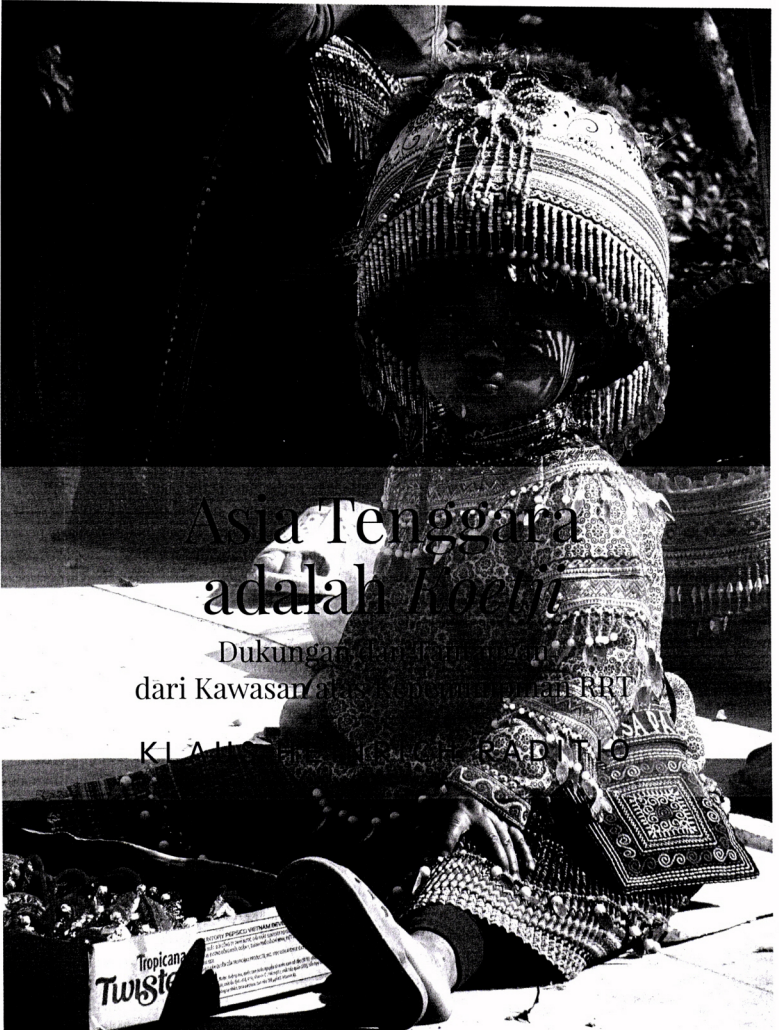
**Asia Tenggara
adalah Koentji**

SINDHUNATA

**Sastra Perlawanan
Ludruk**

SANG IDOLA, 2023
karya SIGIT HANDARI





Asia Tenggara
adalah *Koetj*
Dukung Pergerakan
dari Kawasan Asia Tenggara ke RRT
KLAMATI KEBERADITIO

Foto: Annie Cotnoir - Unsplash.com
"The Hmong Girl", Sapa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam

Melihat Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok (RRT) yang semakin sengit bersaing dalam segala bidang, membuat kita bertanya-tanya apakah dunia sedang berada pada kondisi Perang Dingin? Jika iya, apa bedanya dengan Perang Dingin pada abad ke-20 antara AS dan Uni Soviet?

Para akademisi berbeda pendapat tentang hal ini. Penulis merujuk kepada dua sejarawan unggul dari Stanford University, yaitu Stephen Kotkin dan Niall Ferguson. Kedua tokoh ini meyakini bahwa dunia sekarang berada dalam kondisi Perang Dingin Kedua (Cold War 2.0) untuk membedakan dengan Perang Dingin Pertama.

Kemiripan dan perbedaan kedua Perang Dingin

Sekalipun penulis setuju dengan Kotkin dan Ferguson, analogi ini harus dipakai dengan hati-hati. Kedua Perang Dingin ini memiliki kemiripan maupun perbedaan. Ada beberapa kemiripan dari kedua Perang Dingin. Pertama, AS adalah kekuatan dominan dalam kedua Perang Dingin. Kedua Perang Dingin ini tidak melibatkan kompetitor yang benar-benar seimbang dari segi kekuatan komprehensif. Pada masa Perang Dingin Pertama, AS dan Uni Soviet adalah lawan tanding yang setara dalam hal militer. Namun, dalam hal ekonomi, Uni Soviet adalah si kerdil dibandingkan AS. Pada masa Perang Dingin Kedua, sekalipun jarak kekuatan komprehensif AS dan RRT semakin menyempit, AS masih tetap unggul jauh dari segi militer dan inovasi teknologi.

Kedua, baik Perang Dingin Pertama maupun Kedua adalah persaingan antara kekuatan liberal demokrasi melawan kekuatan nonliberal demokrasi. Sekalipun RRT sudah memeluk ekonomi pasar dan terintegrasi dengan ekonomi dunia, negara ini tidak menganut sistem politik liberal demokrasi. Bahkan, cenderung menentang usaha-usaha liberalisasi yang dipropagandakan oleh negara-negara Barat.

Ketiga, kedua Perang Dingin adalah persaingan untuk mencapai kepemimpinan dunia. AS dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia II ingin mengatur politik dunia dan menjadikan seluruh negara-negara di dunia menganut sistem politik yang sama. Dalam Perang Dingin Kedua ini, AS berusaha mempertahankan posisi unggulnya. Sedangkan China merangkak naik untuk melemahkan posisi AS dan menyebarkan visi politik globalnya.

Lain ladang lain belalang, di Perang Dingin 2.0 ini, ada juga perbedaan-perbedaan signifikan yang perlu dicermati. Pertama, berbeda dengan Perang Dingin Pertama, dalam Perang Dingin Kedua, negara-negara berkembang atau yang dikenal dengan negara-negara Dunia Selatan (*Global South*) tidak hanya berperan sebagai satelit atau penonton. Negara-negara Dunia Selatan memiliki peran yang penting dalam menentukan kemenangan negara-negara adidaya yang bersaing di Perang Dingin Kedua. Faktanya, AS dan RRT saling berebut pengaruh di Dunia Selatan seperti yang akan ditunjukkan dalam pembahasan di bawah.

Kedua, dalam Perang Dingin Kedua, AS dan RRT sama-sama terintegrasi ke dalam sistem global, terutama sistem ekonomi (perdagangan dan finansial). Bahkan hampir tidak mungkin kompetitor yang satu dapat menghantam kompetitor yang lain karena kepentingan kedua rival dalam bidang ekonomi saling berkelindan. Hal ini terbukti dalam perang tarif yang diluncurkan oleh Presiden Trump. Pada bulan April 2025, AS menaikkan ketegangan dengan mengenakan kenaikan tarif sebesar 145%. RRT membalas dengan menaikkan tarif untuk barang-barang impor dari AS sebesar 125% ditambah dengan memasukkan 12 perusahaan AS ke dalam daftar "perusahaan yang tidak dapat dipercaya". Tidak lama kemudian pada akhir bulan April, Trump menunjukkan minat untuk

berunding. Gayung bersambut, RRT yang juga belum menjadi negara yang terlalu kuat dalam perang tarif ini, menyanggupi keinginan Washington untuk berunding. Setelah melalui beberapa ronde perundingan, akhirnya disepakati pada akhir Juli bahwa kedua negara menunda kebijakan tarif hingga 10 November 2025. Ternyata, niat Presiden Trump untuk menggembuk RRT dengan instrument tarif juga memberikan dampak negatif bagi AS. Hal ini sangat berbeda dengan Perang Dunia Pertama. Uni Soviet tidak terintegrasi ke dalam ekonomi global dan memiliki jaringan ekonomi terbatas dengan negara-negara Blok Timur.

Ketiga, berdasarkan penjelasan poin kedua, perbedaan Perang Dingin Kedua dengan yang Pertama terletak pada tujuan akhir. Tidak mungkin tujuan akhir Perang Dingin 2.0 adalah kehancuran salah satu rival. Dalam Perang Dingin Pertama, kedua negara adidaya bertujuan menghancurkan satu sama lain. Perang Dingin Pertama berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991. Dalam Perang Dingin Kedua, kehancuran RRT berarti kerugian besar bagi AS, demikian pula sebaliknya karena kedua ekonomi negara adidaya ini saling berkelindan.

Signifikansi Dunia Selatan

Dalam politik internasional kontemporer, apakah signifikansi negara-negara Dunia Selatan yang tidak dapat diabaikan? Penulis berpendapat bahwa ada paling tidak tiga signifikansi dari negara-negara Dunia Selatan dalam Perang Dingin Kedua. Pertama, 134 dari 195 negara-negara yang ada di dunia adalah negara-negara Dunia Selatan. Dunia Selatan menyumbangkan 54,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (GDP) dunia. Dengan kata lain, Dunia Selatan adalah mayoritas dari segi jumlah maupun kekuatan ekonomi. Tanpa dukungan dari Dunia Selatan, tatanan global yang diperjuangkan oleh AS atau RRT tidak akan langgeng.

Kedua, proporsi mineral kritis cukup terkonsentrasi di negara-negara Dunia Selatan. Mineral kritis seperti nikel, tembaga, litium, kobalt, dan grafit dibutuhkan dalam pengembangan energi hijau. Untuk menjamin pasokan energi pada masa depan, negara-negara adidaya membutuhkan mineral kritis untuk transisi kepada energi hijau. Persaingan di Perang Dingin Kedua ini akan dimenangkan oleh negara yang bukan saja unggul dalam kekuatan militer, tetapi terutama negara yang mampu mendistribusikan komoditas publik (*global*

public goods) secara efektif dan efisien.

Ketiga, negara-negara Dunia Selatan memiliki posisi dan kemampuan diplomatis yang lebih mumpuni pada Perang Dingin 2.0 ini. Negara-negara Selatan bukan saja mampu bermain cantik dalam mengelola persaingan kedua negara adidaya demi memaksimalkan keuntungan (*strategi hedging*), mereka juga mampu mengorganisasi diri dalam berbagai platform kawasan dan internasional, seperti ASEAN, GCC (Kerja sama Negara-negara Teluk), serta BRICS.

Berdasarkan ketiga hal di atas, negara-negara adidaya tidak dapat mengabaikan peran dari negara-negara Dunia Selatan. Demikian juga jika negara-negara Selatan semakin bersatu, mereka akan lebih dapat memaksimalkan peran dan posisi untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi yang lebih besar.

Studi kasus: peran Asia Tenggara terkait posisi RRT di Perang Dingin Kedua

Dunia Selatan yang paling nyata untuk konteks pembaca adalah Asia Tenggara. Semua negara di kawasan Asia Tenggara (termasuk Singapura) adalah negara Dunia Selatan. Bagaimana signifikansi peran Dunia Selatan dalam persaingan adidaya dalam Perang Dingin Kedua ini dapat dilihat dari peran Asia Tenggara dalam mendukung dan memberi tantangan kepada RRT sebagai pemimpin dunia.

Ada tiga hal yang menunjukkan dukungan signifikan Asia Tenggara kepada RRT dalam mewujudkan aspirasinya menjadi pemimpin kawasan dan dunia. Pertama, Asia Tenggara mengakui peran RRT sebagai penyedia kebutuhan publik, terutama dalam masa-masa kritis. Selama Pandemi Covid-19, Asia Tenggara menerima 29% dari total donasi vaksin RRT dan membeli 26% dari total penjualan vaksin RRT. Indonesia adalah konsumen vaksin terbesar dengan pembelian 61% dari seluruh vaksin yang menuju Asia Tenggara.

Kedua, Asia Tenggara mendukung visi global Beijing, yaitu Komunitas Masa Depan Bersama untuk Manusia. Semua negara ASEAN, kecuali Singapura, telah mencantumkan frasa "Komunitas Masa Depan Bersama" dalam pernyataan bersama mereka dengan RRT. Selain itu, pada 2024, Asia Tenggara adalah tujuan investasi Belt and Road Initiative (BRI) terbesar dengan 35,3% dari total investasi BRI. Indonesia sendiri adalah negara penerima investasi terbesar dengan nilai USD 9,3 miliar pada tahun 2024.

Ketiga, Asia Tenggara mendukung kepemimpinan RRT dalam penentuan standar teknologi. Perusahaan-perusahaan RRT seperti Huawei memiliki cengkeraman kuat di infrastruktur digital Asia Tenggara, terutama di bidang aplikasi kecerdasan buatan, telekomunikasi, dan komputasi awan (*cloud computing*). Dari segi infrastruktur, RRT adalah mitra terbesar Asia Tenggara yang mengerjakan 24 dari 34 (85%) megaprojek di kawasan.

Keempat, Asia Tenggara mendukung RRT menjadi pemimpin dalam rantai pasok global. Pada tahun 2015, RRT menginisiasi proyek *Made In China 2025* yang bertujuan menjadikan RRT sebagai pemimpin di 10 sektor strategis, antara lain kereta cepat, mobil listrik, dan pertambangan. Saat ini, RRT menjadi pemimpin di pasar mobil listrik dunia dengan 92% pasokan nikel yang berasal dari Indonesia.

Walaupun demikian, Asia Tenggara tidak hanya memberikan dukungan kepada RRT dalam persaingan global. Kawasan ini juga memberikan tantangan untuk kepemimpinan RRT di kawasan maupun di dunia. Dua tantangan tersebut adalah kasus Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan peran RRT di dalam konflik Kamboja-Thailand tahun 2025. Di LTS, hingga saat ini mayoritas negara ASEAN, terutama negara-negara yang memiliki garis pantai, telah menyatakan dukungan terhadap Keputusan Tribunal UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB) tahun 2016. Keputusan Tribunal ini menyatakan bahwa klaim RRT di LTS tidak valid dan beberapa aktivitas RRT di LTS seperti reklamasi massal dinyatakan ilegal. Hingga hari ini, pembahasan tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di LTS antara RRT dan negara-negara ASEAN juga tidak kunjung mencapai kesepakatan. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh posisi RRT di LTS yang semakin kuat sehingga memperkecil kemungkinan negara tersebut untuk melakukan kompromi. Bagaimanapun juga, fakta bahwa mayoritas negara ASEAN mendukung Keputusan Tribunal UNCLOS merupakan sebuah tantangan besar bagi RRT untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di kawasan dan dunia. Jika RRT tidak dapat atau tidak berkenan untuk menelaraskan klaim dan perilakunya sesuai hukum internasional, maka legitimasinya sebagai pemimpin tidak akan kokoh.

Kasus yang kedua terkait dengan konflik Kamboja-Thailand yang pecah pada bulan Mei 2025. Sejak konflik tersebut meletus, Beijing telah beberapa kali

menawarkan peran untuk menjadi mediator dari dua pihak yang bertikai. Sayangnya, tawaran Beijing tersebut mendapatkan penolakan dari Bangkok. Publik Thailand memandang RRT terlalu dekat dengan Kamboja. Bahkan ada juga persepsi bahwa RRT memasok senjata ke tentara Kamboja yang memperparah konflik. Kesan bahwa RRT terlalu dekat dengan Kamboja dan mengacaukan hubungan antara negara-negara ASEAN sudah terasa kuat sejak 2012. Pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun 2012 menghalangi tercapainya konsensus antar negara-negara ASEAN terkait LTS karena menuruti desakan RRT. Akibat insiden ini, untuk pertama kali dalam sejarah sejak ASEAN berdiri tahun 1967, pertemuan para menlu negara-negara ASEAN tidak menghasilkan sebuah pernyataan bersama (*joint communique*). Peran RRT dalam hal ini sangat mengecewakan negara-negara ASEAN.

Pada akhirnya, AS-lah yang mengambil peran menentukan dalam pencapaian gencatan senjata antara Kamboja-Thailand. Presiden Trump pada akhir Juli berbicara kepada para pemimpin Kamboja dan Thailand sekaligus mendesak mereka untuk melakukan pertemuan dengan ancaman bahwa tidak akan ada perundingan lebih lanjut mengenai tarif jika gencatan senjata tidak segera dicapai. Pada 28 Juli 2025, para pemimpin Kamboja dan Thailand mencapai gencatan senjata melalui mediasi Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 di Kuala Lumpur. Dalam pernyataan resmi ASEAN disampaikan bahwa gencatan senjata ini tercapai karena mediasi Malaysia, kerja organisasi AS, dan peran aktif RRT. Perwakilan AS dan RRT memang hadir dalam pertemuan Kuala Lumpur tersebut. Sebagai ganjaran atas pencapaian ini, Presiden Trump memberikan pengurangan tarif impor untuk Kamboja, Thailand, dan Malaysia hingga 19%.

Satu hal yang menarik dari pencapaian gencatan senjata Kamboja dan Thailand ini adalah peran dua negara adidaya yang bersaing di kawasan. Konflik Kamboja dan Thailand bukan hal yang baru. Pada tahun 2011, kedua negara ini juga terlibat konflik bersenjata di masalah yang sama, yaitu masalah perbatasan dan kepemilikan atas Candi Preah Vihear. Bedanya, pada tahun 2011, gencatan senjata dapat dicapai hanya dengan mediasi Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011, tanpa peran dari negara adidaya mana pun. Kini kawasan Asia

Tenggara telah menjadi rebutan bagi negara-negara adidaya yang bersaing. Setiap peristiwa yang menonjol di kawasan, mau tidak mau pasti melibatkan negara-negara adidaya.

Dari konflik Kamboja-Thailand ini dapat dilihat bahwa peran kepemimpinan RRT juga terbatas. RRT tidak terlalu mendapat kepercayaan, terutama karena dianggap tidak mampu menjadi mediator yang imparial. Jika RRT berhasil menjadi mediator bagi Kamboja dan Thailand, kesuksesan ini pasti dianggap Beijing sebagai bukti aplikasi dari Global Security Initiative (visi global RRT tentang keamanan), seperti yang diklaimnya ketika memediasi Saudi dan Iran pada bulan Maret 2023. Kurangnya kepercayaan terhadap RRT untuk memainkan peran di kawasan merupakan tantangan besar bagi RRT untuk menjadi pemimpin global.

Negara-negara Dunia Selatan dalam Perang Dingin 2.0 bukan penonton pasif di gelanggang politik dunia. Mereka memiliki peran dalam persaingan negara-negara adidaya. Kawasan Asia Tenggara sebagai Dunia Selatan memainkan peran dalam persaingan tersebut. Kawasan ini terbukti memberi dukungan dan tantangan kepada RRT dalam mengejar aspirasinya menjadi pemimpin dunia. Jika RRT dapat memelihara dukungan dan mengelola tantangan dari Asia Tenggara, maka aspirasinya menjadi pemimpin akan semakin dekat dengan kenyataan. Sebaliknya, jika Asia Tenggara yang menjadi tetangga terdekat dan mitra dagang terbesar tidak memberikan legitimasi kepada RRT, maka hasrat kepemimpinan Beijing mungkin akan hanya menjadi impian di siang bolong. Dalam Perang Dingin 2.0 ini, Asia Tenggara adalah *koentji*!

Klaus Heinrich Radtjo,

mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

Red.: (Tulisan ini dikembangkan dari Klaus Heinrich Radtjo, "China's Global Leadership: The Southeast Asian Test," *The Diplomat*, 9 Oktober 2025, <https://thediplomat.com/2025/10/chinas-global-leadership-the-southeast-asian-test/>)

Rujukan

- Busbarat, Pongphisoot. China's Mediation Offer in the Thailand-Cambodia Border Dispute Sheds Light on Beijing's Security Role in Southeast Asia." *Carnegie*, 6 Agustus 2025, <https://carnegieendowment.org/posts/2025/08/chinas-mediation-offer-in-the-thailand-cambodia-border-dispute-sheds-light-on-beijings-security-role-in-southeast-asia?lang=en>
- Ikenberry, G. John. "Three Worlds: the West, East and South and the competition to shape global order." *International Affairs* 100, no. 1 (2024): 121-138.
- Lee, Brice Tseen Fu, Salman Ali Bettani, Juan Pablo Sims, and Yun-Tso Lee. "Southeast Asia as a Latent Kingmaker in the US-China Rivalry." *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations* 10, no. 1 (2024): 57-99.
- Pei, Minxin. "More Method than Madness: China's Response to Trump's New Tariff War." *China Leadership Monitor*. 31 Agustus 2025, <https://www.prclleader.org/post/more-method-than-madness-china-s-response-to-trump-s-new-tariff-war>.
- Stromseth, Jonathan. *Don't make us choose: Southeast Asia in the throes of US-China rivalry*. Washington, DC: Brookings Institution, 2019.